



Terbit online pada laman web jurnal: <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>

Warta Pengabdian Andalas

Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks

ISSN (Print) 0854-655X | ISSN (Online) 2797-1600

Public Administration Ethics Education to Build Anti-Corruption Integrity among Students of SMP N 13 Padang

Edukasi Etika Administrasi Publik untuk Membentuk Integritas Anti Korupsi pada Pelajar SMP N 13 Padang

Roni Ekha Putera^{1*}, Tengku Rika Valentina², Tirza Haqia Purnama¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Padang, 25163. Indonesia

²Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 25163. Indonesia

*Corresponding author: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

Received: December 19, 2023

Accepted: April 21, 2024

Published: June 27, 2024

Keywords:

corruption,
education, ethics,
Junior High
School, Padang

ABSTRACT

The high level of corruption, which has become a pathology in developing countries, especially Indonesia, is evidenced by the 2022 international transparency data, which scored 34/100 and ranked 110 out of 180 surveyed countries. Indonesia ranks as the 5th most corrupt country in Southeast Asia. With these results, Indonesia has only been able to increase its Corruption Perception Index (CPI) score by 2 points from 32 over the past decade since 2012. Despite Law No. 20 of 2001's eradication of corruption, which covers various aspects, related to anti-corruption efforts, including education and anti-corruption socialization, this pathology remains unresolved. Therefore, a strong foundation is needed, especially among the younger generation as the nation's future leaders, by strengthening students' character regarding integrity and courage against corruption. This community engagement used socialization, interviews with school members, and participatory observation within the school environment. The concept of public administration ethics serves as the basis for this activity. The results showed that anti-corruption education through the perspective of public administration at SMP N 13 Padang plays a significant role in shaping students' integrity and courage in combating corruption. As adolescents, students are in the process of forming moral values and behaviors. Thus, anti-corruption education interventions can significantly impact shaping their character. Students improved their understanding of corruption and developed a more courageous attitude and strong integrity. The results provided valuable insights and a foundation for further improvement in anti-corruption education in middle schools.

Kata Kunci:

edukasi, etika,
korupsi, Padang,
Sekolah Menengah
Pertama

ABSTRAK

Tingginya angka korupsi yang sudah menjadi patologi di negara – negara berkembang khususnya Indonesia, dibuktikan dari data transparansi internasional 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Indonesia menduduki peringkat ke 5 negara terkorup di Asia Tenggara, dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor *Corruption Perception Index* (CPI) sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Meskipun sudah ada undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait pemberantasan korupsi, dan salah satu di antaranya adalah pendidikan dan sosialisasi anti korupsi, namun

patologi ini masih belum teratasi. Maka dari itu, diperlukan fondasi yang kuat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa dengan cara memperkuat karakter siswa dalam hal integritas dan keberanian melawan korupsi. Pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi, wawancara dengan warga sekolah dan observasi partisipatif di lingkungan sekolah. Konsep etika administrasi publik menjadi landasan dalam pengabdian ini. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa edukasi anti korupsi melalui perspektif administrasi publik di SMP N 13 Padang memainkan peran penting dalam membentuk sikap integritas dan keberanian siswa dalam melawan korupsi karena dalam usia remaja, siswa sedang dalam proses pembentukan nilai-nilai moral dan perilaku, sehingga intervensi edukasi anti korupsi dapat memberikan dampak yang signifikan dalam membentuk karakter mereka. Siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka tentang korupsi dan mengembangkan sikap yang lebih berani serta integritas yang kuat dalam menghadapinya. Hasil pengabdian ini memberikan wawasan yang berharga dan memberikan landasan untuk perbaikan lebih lanjut dalam pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah menengah pertama.

PENDAHULUAN

Tingginya angka korupsi di berbagai negara di dunia menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Contohnya tingginya angka kriminalitas akibat kemiskinan yang makin meningkat, menurunkan kepercayaan pada negara serta menggoyahkan fondasi negara (Pellissery & Bopaiah, 2023). Alokasi sumber daya yang tidak efisien menyebabkan pendapatan negara tidak digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat (Wang et al., 2020). Korupsi telah menjadi patologi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dari data transparency international 2022, Indonesia menduduki peringkat negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara (Prabowo, 2022). Meskipun telah ada upaya melalui berbagai peraturan dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun patologi korupsi masih merajalela. Korupsi menjadi sebuah fenomena umum di Indonesia yang sulit dihilangkan bahkan sudah menjadi tradisi bagi para pemangku jabatan mulai dari tingkat terendah di desa hingga ke tingkat tertinggi di pemerintahan pusat.

Dalam hal ini sekolah menengah pertama (SMP) menjadi tahap transisi paling penting karena usia SMP merupakan usia remaja dimana usia tersebut merupakan yang paling krusial dalam tahap kehidupan manusia (Farida, 2023). Sekolah merupakan tempat membentuk karakter dan membangun fondasi pendidikan. Di sekolah, siswa diajarkan etika dan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan rasa empati melalui kurikulum (Shaliadi & Dannur, 2023). Melalui organisasi sekolah, ekstrakurikuler pengembangan minat dan bakat siswa serta pengajaran dari guru sekolah juga menjadi tempat dimana siswa bisa belajar dan memahami arti tanggung jawab, memiliki integritas dan mampu berkontribusi secara lebih dalam ke masyarakat.

Memberantas korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena membutuhkan komitmen, kesadaran dan sinergi yang kuat antar masing – masing aktor kebijakan baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat (Hope, 2020). Selain itu peran pemimpin juga sangat penting dalam memberikan pengaruh yang signifikan untuk menangani korupsi. Dalam hal ini Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional juga menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diimplementasikan di semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Peraturan kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 33

tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dibuat sebagai upaya untuk pencegahan perilaku korupsi. Namun, materi anti korupsi nyatanya masih belum masuk ke kurikulum pendidikan di jenjang sekolah. Alasannya karena kementerian terkait belum menemukan jam pelajaran yang sesuai karena padatnya kurikulum saat ini.

Sekolah juga merupakan tempat penting dalam membangun fondasi pendidikan sejak tingkat dasar hingga menengah atas (Khaidir & Suud, 2020). Melalui sistem pendidikan yang terstruktur dan komprehensif, sekolah menjadi wahana untuk mengembangkan potensi anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses. Pada tingkat dasar, sekolah berperan dalam memberikan dasar-dasar pendidikan kepada anak-anak. Mereka diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan konsep-konsep penting seperti rasa disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Sekolah dasar tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan moral anak-anak (Kamila, 2023).

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, pendidikan juga harus bisa beradaptasi dan mengiringi kemajuan ini. Sekolah dituntut untuk memberikan pendidikan yang sejalan dengan perkembangan zaman namun tidak melupakan ajaran – ajaran yang lebih penting dari pada sekedar ilmu pengetahuan, yaitu ajaran etika dan moral. Termasuk pendidikan pencegahan dan penanggulangan korupsi. Pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting karena korupsi adalah masalah sosial dan ekonomi yang merusak dan berdampak negatif pada masyarakat dan negara (Bereziuk & Yaremchuk, 2020).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Humaira pada tahun 2021 bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa sekolah dasar (Humaira et al., 2021). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung pengembangan karakter siswa melalui pendidikan anti korupsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Peran guru dianggap sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang tindakan korupsi dan menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada siswa. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa implementasi materi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dapat dilakukan melalui tahap mengembangkan kurikulum pembelajaran PPKn. Namun, terdapat kekurangan dalam penelitian ini karena tidak dijelaskannya metode penelitian yang digunakan secara rinci. Selain itu, penelitian ini juga tidak memberikan informasi tentang sampel penelitian, sehingga tidak dapat dipastikan seberapa representatif hasil penelitian ini terhadap populasi siswa sekolah dasar secara umum.

Selain itu penelitian oleh Riko tahun 2023 membahas tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia (No et al., 2023). Korupsi dijelaskan sebagai perbuatan buruk yang merugikan orang lain, masyarakat, maupun negara. Penelitian ini juga membahas pentingnya nilai-nilai pancasila dalam pendidikan anti korupsi, serta metode penelitian yang digunakan. Pendidikan anti korupsi memiliki implikasi besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan nasional Indonesia meliputi pengaitan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi, pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan, serta peran guru sebagai teladan dan pemberi informasi tentang bahaya korupsi. Kekurangan penelitian ini adalah kurangnya pembahasan mengenai metode yang digunakan, serta kurangnya data empiris atau temuan langsung dari lapangan yang dapat mendukung argumen yang disajikan dalam artikel ini. Selain itu, artikel ini juga tidak memberikan informasi mengenai hasil yang mendukung implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan nasional Indonesia.

Maka dari itu dibutuhkan metode terbaru yang lebih secara nyata mengedukasi generasi muda dan data yang valid serta *update* dan sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan dengan menggunakan prespektif administrasi publik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran administrasi publik dalam membentuk sikap integritas dan keberanian siswa di SMP N 13 di Padang. Dengan fokus pada konsep etika administrasi publik, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana edukasi etika dapat memperkuat karakter siswa dalam menghadapi tantangan korupsi. Dengan demikian, pengabdian ini berharap memberikan kontribusi konstruktif terhadap pengembangan pendidikan anti-korupsi di tingkat pendidikan dasar, menciptakan pondasi yang kuat untuk generasi muda sebagai pilar keberlanjutan bangsa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi edukasi etika administrasi publik, wawancara mendalam dengan siswa dan guru serta didukung oleh observasi partisipatif. Ini bertujuan untuk mendalami pemahaman siswa terkait edukasi anti-korupsi di SMP N 13 Kota Padang. Keputusan untuk menargetkan siswa sebagai fokus program ini didasarkan pada pemahaman bahwa remaja merupakan kelompok yang krusial dalam membentuk nilai-nilai sosial dan sikap masa depan. Melalui pendidikan anti-korupsi yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah, dapat memberdayakan generasi muda dengan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali, menolak, dan melawan praktik korupsi. SMP N 13 Padang adalah sekolah dengan akreditasi A dan pemilihan sekolah dengan akreditasi A ini dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi geografis, struktur sosial, dan ukuran sekolah untuk memastikan representasi yang seimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi edukasi diberikan kepada siswa dan guru SMP N 13 Kota Padang, yang meliputi materi edukasi anti korupsi dan pengaruh kurikulum terhadap pembentukan sikap integritas dan keberanian siswa. Setelah pelajar diberikan edukasi tentang etika administrasi publik, selanjutnya dengan kerja sama guru serta tenaga pendidik, dilakukan monitoring (pemantauan) untuk mengetahui jangkauan atau perkembangan nilai-nilai etika itu dapat diterapkan para pelajar.

A. Edukasi Anti Korupsi: Membahas peran edukasi anti korupsi dalam perspektif administrasi publik di sekolah menengah pertama

Memberikan pemahaman etika administrasi publik kepada pelajar SMP N 13 Padang bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir generasi muda agar mampu bertanggung jawab secara prinsip dan moral dalam bersikap dan berperilaku (bertindak atau melakukan perbuatan) di rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat. Apabila generasi muda sudah mampu bertanggung jawab secara moral terhadap perilaku atau aktifitasnya, maka diyakini itu berdampak besar bisa membawa mereka menghindari dan menolak praktek-praktek korupsi (Trisiana et al., 2023). Sehingga edukasi etika administrasi publik kepada generasi muda ini bisa dianggap sebagai salah satu cara menanam bibit-bibit anti korupsi bagi calon-calon pemimpin bangsa, penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan di masa depan.

Dari antusiasme pelajar SMP yang menjadi lokasi pengabdian, memberi harapan bahwa materi atau pemahaman yang mereka terima tersebut bisa meresap dalam pikiran sehingga menjadi karakter mereka. Para pelajar SMP tersebut dijelaskan tentang nilai etika administrasi publik yang meliputi nilai efisiensi, membedakan milik pribadi dan kantor, nilai impersonal, nilai merit system, nilai tanggung jawab, nilai akuntabilitas, nilai responsif. Melalui metode diskusi, pelajar diajak untuk mengetahui contoh-contoh penerapan nilai etika administrasi publik tersebut dalam keseharian mereka di sekolah dan di rumah. Kemudian pelajar diajak untuk menerapkan prinsip nilai-nilai etika tersebut, untuk memancing semangat dan keberlanjutan maka disepakati dengan cara evaluasi dan pemberian hadiah sebagai apresiasi.



Gambar 1. Sosialisasi dan edukasi anti korupsi

Edukasi anti korupsi memainkan peran krusial dalam membentuk sikap integritas dan keberanian siswa di sekolah menengah pertama (Jannah & Adi, 2023). Perspektif administrasi publik memperkuat upaya ini dengan menekankan prinsip-prinsip etika dan tata kelola yang bersih (Kardina & Frinaldi, 2023). Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan siswa dan guru menunjukkan bahwa program edukasi anti korupsi memiliki dampak positif yang signifikan. Untuk mengukur dampak positif dari program edukasi anti korupsi ini menggunakan metode evaluasi. Pertama, dilakukan survei atau kuesioner kepada siswa sebelum dan sesudah program untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait korupsi. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi program tersebut mempengaruhi lingkungan sekolah dan interaksi antara siswa dan guru. Selanjutnya, data dari wawancara mendalam dengan siswa dan guru juga menjadi indikator dampak positif. Selain itu, melacak partisipasi siswa dalam kegiatan terkait anti korupsi, seperti aktif dalam sosialisasi dan diskusi.

Hasil observasi partisipatif menggambarkan bahwa pelaksanaan program sosialisasi anti korupsi di sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sikap anti korupsi di kalangan siswa. Keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti seminar dan kampanye anti korupsi, memberikan wawasan lebih lanjut tentang dampak positif dari edukasi ini. Pengabdian ini menunjukkan bahwa upaya edukasi anti korupsi yang dilakukan melalui perspektif administrasi publik mampu meresapi budaya sekolah dan membentuk norma-norma perilaku yang bersih.

Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pendekatan administrasi publik memberikan dasar yang efektif untuk merespon tantangan korupsi di kalangan siswa. Dengan adanya

edukasi anti korupsi yang terfokus pada konsep etika administrasi publik, siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka tentang korupsi. Data wawancara menggambarkan perubahan sikap siswa yang semakin berani dan memiliki integritas yang kuat dalam menghadapi isu korupsi.

B. Pengaruh Kurikulum: Mengevaluasi pengaruh kurikulum terhadap pembentukan sikap integritas dan keberanian siswa

Dalam rangka agar materi etika administrasi publik dapat diintegrasikan dengan efektif dalam pembelajaran bagi pelajar, penyesuaian dengan kurikulum yang berlaku menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, pada kurikulum yang berlaku saat ini, terdapat peluang untuk memperkaya unsur etika administrasi publik melalui penguatan profil pelajar pancasila. Materi etika administrasi publik diyakini dapat memperkaya konten pembelajaran yang terkait dengan profil pelajar pancasila, mengingat etika merupakan salah satu dasar pancasila (Sofiyana et al., 2021).

Selanjutnya, evaluasi terhadap pengaruh kurikulum dalam pembentukan sikap integritas dan keberanian siswa menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan. Data dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa desain kurikulum yang memasukkan prinsip-prinsip etika administrasi publik berperan kunci dalam membentuk landasan etika siswa. Materi pembelajaran yang mendalam tentang konsep integritas, transparansi, dan akuntabilitas membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya melawan korupsi.



Gambar 2. Foto bersama siswa SMP N 13 Padang

Efektivitas kurikulum ini terlihat dalam partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran, termasuk diskusi kelas dan proyek kolaboratif. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai etika yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Hasil observasi mencerminkan bahwa kurikulum yang dirancang dengan baik mendorong siswa untuk berpikir kritis dan merespon isu korupsi dengan sikap yang lebih proaktif.

Selain itu, penilaian terhadap kurikulum ini didukung oleh tanggapan positif dari para pengajar. Guru melaporkan bahwa siswa menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan yang tinggi dalam materi pembelajaran yang berkaitan dengan etika administrasi publik. Kurikulum ini memunculkan diskusi yang mendalam, memperkaya pemahaman siswa tentang konsep integritas dan keberanian dalam konteks pencegahan korupsi. Pentingnya kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika administrasi publik juga tercermin

dalam pencapaian siswa. Data evaluasi menunjukkan adanya peningkatan hasil akademis siswa yang sejalan dengan penerapan kurikulum anti korupsi. Siswa yang mengikuti program ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu korupsi dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sikap integritas dan keberanian melawan korupsi.

Dengan demikian, hasil evaluasi ini menegaskan bahwa pengaruh positif kurikulum anti korupsi, terutama yang berbasis prinsip etika administrasi publik, mampu membentuk sikap integritas dan keberanian siswa. Dengan kelanjutan dan peningkatan kurikulum ini, diharapkan dapat tercipta generasi yang lebih peka terhadap isu korupsi dan memiliki kesiapan untuk melawan praktik korupsi di masa depan.

C. Pemantauan Terhadap Perilaku Siswa: Mendiskusikan Ampak Pemantauan Ketat Terhadap Perilaku Siswa dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Bebas dari Korupsi

Setelah pelajar diberikan edukasi tentang etika administrasi publik, selanjutnya dengan kerja sama guru serta tenaga pendidik, dilakukan monitoring (pemantauan) untuk mengetahui jangkauan atau perkembangan nilai-nilai etika itu dapat diterapkan para pelajar. Untuk mengefektifkan pemantauan, dilakukan dengan membuat sistem penilaian berbasis indikator-indikator etika administrasi publik yang harus dijalankan pelajar. Orang tua/wali murid juga diajak berperan memantau pelajar saat sudah kembali ke rumah. Dari hasil wawancara terhadap para pelajar, diketahui terdapat peningkatan dan penguatan praktik-praktik etika administrasi publik ini ketika pihak sekolah dan orang tua secara intensif melakukan pemantauan kepada mereka.



Gambar 3. Diskusi terkait anti korupsi bersama siswa SMP N 13 Padang

Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu, yang biasanya mencakup periode akademik atau tahun ajaran. Selama pemantauan, berbagai jenis data dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Data yang diperoleh tidak hanya mencakup informasi terkait pencegahan tindakan korupsi, tetapi juga memperhatikan pengidentifikasian potensi perilaku korup.

Dari data tersebut, terlihat bahwa pemantauan yang ketat tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendeteksi tindakan korupsi yang potensial. Hal ini memberikan kesadaran kepada siswa bahwa perilaku yang tidak etis dan tindakan korupsi akan menghadapi respons yang tegas, sehingga memperkuat norma-norma integritas dan keberanian. Dengan adanya

mekanisme pengawasan yang efektif, siswa merasa termotivasi untuk mengambil peran aktif dalam memelihara lingkungan yang bebas dari korupsi di lingkungan sekolah mereka.

KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan edukasi anti korupsi dengan menggunakan konsep administrasi publik di SMP N 13 Padang memberikan dampak positif yang signifikan dalam membentuk sikap siswa terhadap korupsi. Konsep etika administrasi publik terbukti relevan dan efektif dalam merancang kurikulum anti korupsi yang mampu menginternalisasi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Program sosialisasi anti korupsi, yang mencakup pemantauan ketat terhadap perilaku siswa, berhasil membentuk budaya sekolah yang menolak korupsi secara tegas. Beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan dalam perbaikan pendidikan anti korupsi di sekolah menengah pertama. Pertama, penting untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi konsep etika administrasi publik dalam pengembangan kurikulum anti korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau kembali dan memperbarui kurikulum secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Selain itu, diperlukan peningkatan dalam program sosialisasi anti korupsi dengan fokus pada partisipasi aktif siswa. Melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan dan diskusi mengenai etika, integritas, dan dampak negatif korupsi dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya melawan korupsi. Saran untuk penelitian mendatang mencakup eksplorasi alternatif pemantauan perilaku siswa yang lebih inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bereziuk, S., & Yaremchuk, N. (2020). Corruption as a Destructive Factor of Economic Development. *The Scientific Heritage*, 47–6, 11–21.
- Farida, A. (2023). *Pilar-pilar Pembangunan Karakter Remaja: Metode Pembelajaran Aplikatif untuk Guru Sekolah Menengah*. Nuansa Cendekia.
- Hope, K. R. (2020). Corruption reduction as a target of the Sustainable Development Goals: Applying indicators and policy frameworks. In *The emerald handbook of crime, justice and sustainable development* (pp. 105–130). Emerald Publishing Limited.
- Humaira, J., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tembusai*, 5(3), 8612–8620.
- Jannah, S. M., & Adi, A. S. (2023). Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship di SMP Negeri X. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 26–39.
- Kamila, A. (2023). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dalam Membina Karakter Anak Sekolah Dasar. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 321–338.
- Kardina, M., & Frinaldi, A. (2023). Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 133–142.

- Khaidir, E., & Suud, F. M. (2020). Islamic education in forming students' characters at as-shofa Islamic High School, pekanbaru Riau. *International Journal of Islamic Educational Psychology*, 1(1), 50–63.
- No, V., Desember, J., Riko, M., & Zulfahmi, Y. (2023). *Anti Korupsi Dalam Pendidikan Nasional*. 2(2), 378–382.
- Pellisery, S., & Bopaiah, P. (2023). 244C17Corruption and Social Policy. In K. J. Baehler (Ed.), *The Oxford Handbook of Governance and Public Management for Social Policy* (p. 0). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190916329.013.29>
- Prabowo, H. Y. (2022). Corruption and the Curse of Over-Quantification. *Journal of Financial Crime*.
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(1), 15–22.
- Sofiyana, M. S., Ahdiyat, M., Iskandar, A. M., Hairunisya, N., Usriyah, L., Dwiantara, L., Ariani, B., Izzati, F. A., Muryani, E., & Gunawan, B. P. (2021). *PANCASILA, Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik*. Unisma Press.
- Trisiana, A., Gifita, A. O., Fatmawati, A., Maharani, L., & Sari, S. P. K. (2023). *Benturan Nilai Moral Pancasila terhadap Digitalisasi Era Disrupsi*. Unisri Press.
- Wang, S., Zhao, D., & Chen, H. (2020). Government corruption, resource misallocation, and ecological efficiency. *Energy Economics*, 85, 104573.

@2024 Putera *et al.*

This is an open access article licensed under the terms of a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>).